



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.674.842.938.494,00
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>1.677.977.263.966,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(3.134.325.472,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	40.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	<u>36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	3.134.325.472,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.674.842.938.494,00 Yang bersumber dari :

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp.	96.269.765.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	11.543.455.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp.	10.800.000.000,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	Rp.	<u>38.000.000.000,00</u>
	Rp.	156.613.220.000,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebagai berikut :

Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.430.460.610.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	<u>67.200.292.494,00</u>
	Rp.	1.497.660.902.494,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang- Undangan	Rp.	<u>20.568.816.000,00</u>
	Rp.	20.568.816.000,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.677.977.263.966,00, yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebagai berikut :

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp.	635.874.510.432,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	334.254.588.458,00
c. Belanja Bunga	Rp.	8.000.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp.	4.259.306.300,00
e. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000,00</u>
	Rp.	982.438.405.190,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	9.745.870.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	197.708.665.933,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	25.183.780.446,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	186.553.033.500,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>617.159.480,00</u>
	Rp.	419.808.509.359,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.864.731.217,00
-----------------------	-----	------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebagai berikut :

Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	10.781.322.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>261.084.296.200,00</u>
	Rp.	271.865.618.200,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00, yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 40.000.000.000,00

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebagai berikut :

Pengeluaran pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo Rp. 36.865.674.528,00

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
 - b. kejadian luar biasa;
 - c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
 - e. pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

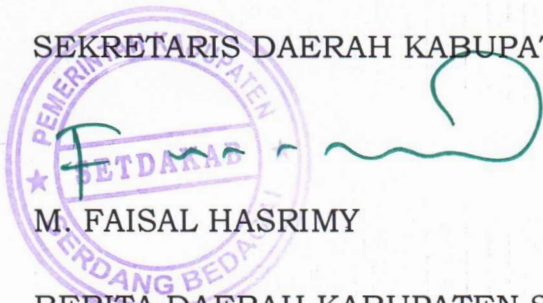
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 DESEMBER 2022
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022
NOMOR 85

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.613.220.000
4.1.01	Pajak Daerah	96.269.765.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	605.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	605.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	605.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.235.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.235.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.235.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.420.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.420.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.420.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.904.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.904.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.904.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	38.192.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	38.192.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	38.192.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	459.800.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	459.800.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	459.800.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.815.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.815.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.815.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.815.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.815.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.815.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.226.615.000
4.1.01.15.01	PBBP2	30.226.615.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	30.226.615.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.567.350.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.567.350.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.567.350.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.543.455.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.367.205.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.880.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.880.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	770.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	770.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	141.750.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	141.750.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	139.200.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	139.200.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	816.255.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	816.255.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.975.750.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.750.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	75.750.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	800.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	800.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.088.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.088.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	77.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	77.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.500.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	30.000.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	30.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.800.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.800.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.800.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	6.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	3.050.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.350.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.350.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.300.000
4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	2.300.000
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	2.000.000
4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	2.000.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.595.700.000
4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.595.700.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	20.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	20.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	20.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.497.660.902.494
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.430.460.610.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.228.959.842.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	40.773.717.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.808.197.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.501.792.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.668.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.457.400.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	135.439.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.762.081.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	760.868.887.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	760.868.887.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	187.721.702.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.167.505.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	31.905.954.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.052.895.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	8.000.961.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.241.614.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.502.689.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.622.363.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.710.564.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.659.737.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.414.111.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.399.566.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.466.193.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.577.550.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	239.595.536.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	97.864.400.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.165.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	95.758.986.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.723.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.486.867.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.982.049.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.654.557.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	579.832.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	375.600.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	594.575.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	410.170.000
4.2.01.05	Dana Desa	201.500.768.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	201.500.768.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	201.500.768.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.200.292.494
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	67.200.292.494
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.200.292.494
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.434.557.636
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.923.945.450
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.894.006.254
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	298.427.208
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.649.355.946
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.568.816.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.568.816.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.568.816.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.568.816.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.568.816.000
	Jumlah Pendapatan	1.674.842.938.494
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	982.438.405.190
5.1.01	Belanja Pegawai	635.874.510.432
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	403.623.453.072
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	296.884.424.673
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	257.688.278.903
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.196.145.770
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.444.054.012
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.126.103.694
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.317.950.318
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.441.433.970
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.441.433.970
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.682.850.728
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.194.362.478
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.488.488.250
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.109.855.014
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.906.255.014
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	203.600.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.383.642.305
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.161.020.472
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.222.621.833
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	917.453.934
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	917.453.934
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	719.849.098
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.496.060
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	716.353.038
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.214.674.288
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.552.488.344
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.662.185.944
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	711.746.952
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	625.654.836
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	86.092.116
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.113.468.098
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.862.201.173
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	251.266.925
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	87.970.463.471

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	87.970.463.471
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	87.970.463.471
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.355.398.151
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.647.616.188
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.687.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	158.812.500
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	90.750.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	108.900.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.432.200.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	17.242.500
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	68.062.500
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.125.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	68.062.500
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.133.498.063
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	546.275.625
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	432.879.563
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	108.000.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	28.875.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.315.625
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.220.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.609.563
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.840.625
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.000.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	116.250.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	78.300.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.887.500
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	206.250
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.125.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	95.758.986.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	95.758.986.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.723.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.723.500.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.669.046.286
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.669.046.286
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.093.370.114
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.285.170.114
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.088.200.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	720.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.347.869.994
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122.389.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122.389.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.164.271.056
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.009.488
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.068.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	725.325.744
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.638.231
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.638.231
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	470.321
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	470.321
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.528
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	16.528
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.484
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	486.348.825
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.025.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	21.175.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.100.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	14.520.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	190.960.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.299.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.075.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	150.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.075.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	151.133.075
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	72.836.750
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	57.717.275
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.400.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.850.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	708.750
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	696.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.081.275
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	378.750
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.000.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.500.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	10.440.000
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	385.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	27.500
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	150.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.254.588.458
5.1.02.01	Belanja Barang	105.866.662.170
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	105.859.661.400
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.849.709.160
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	250.056.365
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.225.895.742
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	24.087.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	559.243.974
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.108.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	14.493.080
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.108.902.450
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	95.293.240
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	600.794.395
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	111.506.460
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	80.536.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.380.995.630
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.948.739.360

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.322.224.847
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	286.811.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.547.931.015
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.393.931.090
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	885.473.628
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	840.525.689
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	375.290.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.768.869.250
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.050.861.470
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.208.415.239
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.566.050.075
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	65.585.490
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.971.991.570
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.928.412.125
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	49.950.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	167.896.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.704.229.956
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	810.953.550
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.600.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.200.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	28.800.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.560.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	4.840.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	29.860.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	262.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	246.537.500
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.000.770
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.999.995
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	2.000.775
5.1.02.02	Belanja Jasa	118.054.405.744
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94.468.567.925
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.845.039.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.069.505.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.100.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	665.031.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	187.360.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	13.910.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	73.442.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	331.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.557.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.123.027.285
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.950.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.295.060.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.316.880.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	668.550.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	35.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.050.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.537.384.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.323.100.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.203.866.200
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.955.892.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	569.250.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	326.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	308.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	32.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	366.406.035
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	188.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	860.072.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	187.970.445
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	129.113.280
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.799.852.285
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	469.509.695
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.828.888.500
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	18.234.300
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	35.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	669.082.400
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	138.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	48.642.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	132.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.668.549.280
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.142.568.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.981.280
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	517.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	58.980.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	16.500.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	42.480.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.094.548.430
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	356.500.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	297.080.350
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.344.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	255.528.500
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.827.500
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	198.240.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.931.446.100
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.310.000
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	27.966.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	73.750.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	473.000.000
5.1.02.02.04.0428	Belanja Sewa Sumur Pemboran	19.999.980
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	5.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.885.530.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	16.500.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	100.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	175.600.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	836.514.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	606.916.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.850.000
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.850.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.130.868.500
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.000.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	103.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	29.250.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	9.900.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	397.485.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	200.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.457.483.500
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	133.750.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	200.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	400.000.000
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	984.500.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	565.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	419.500.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	350.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	350.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.547.107.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.586.607.500
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.960.500.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	765.999.400
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.764.375
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	33.350.625
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	19.057.500
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	22.869.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	300.762.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.620.925
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.293.125
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	236.250
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.293.125
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	238.034.594
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	114.717.881
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	90.904.709
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.680.000
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.063.750
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.150.000
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.575.000
5.1.02.02.14.0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.116.281
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.500

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.14.0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.096.200
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.428.009
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	596.531
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.300.000
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.412.500
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.443.000
5.1.02.02.14.0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	606.375
5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	43.313
5.1.02.02.14.0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	236.250
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.281.680.006
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	285.494.400
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.494.400
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	250.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.647.798.415
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	233.790.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	22.236.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.791.061.500
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	185.550.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	629.830.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.600.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	101.640.000
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	150.000.000
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.432.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	76.780.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	133.287.380
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	63.604.800
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	100.626.625
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	491.822.050
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	2.846.160
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	346.814.200
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	55.081.400
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	142.219.500
5.1.02.03.02.0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	1.576.800
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.258.154.100
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.053.704.500
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	478.520.000
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.600.000.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	25.929.600
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.064.233.091
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.117.070.471
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.700.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.100.000.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	700.000.000
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	100.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	347.162.620
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	26.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	26.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.116.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.916.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.904.153.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.976.085.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.036.122.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri	200.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.935.480.538
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.630.236.704
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.584.236.704
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	36.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.305.243.834
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	200.017.700
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.105.226.134
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	8.000.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	8.000.000.000
5.1.03.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	8.000.000.000
5.1.03.03.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	8.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	4.259.306.300
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.259.306.300
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.259.306.300
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.259.306.300
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	50.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	50.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	50.000.000
5.2	BELANJA MODAL	419.808.509.359
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.745.870.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	9.745.870.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.745.870.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	4.745.870.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.000.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	5.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.708.665.933
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	189.930.000

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	189.930.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	189.930.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.983.595.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.983.595.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.105.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	903.520.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.993.400.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.570.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.513.500
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.963.500
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	1.963.500
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.550.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	4.550.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	150.258.215.984
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	142.798.696.050
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	113.861.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	142.684.835.050
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.255.682.014
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.919.681.970
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	149.850.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	564.740.340
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.621.409.704
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	203.837.920
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	84.299.200
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	34.987.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	84.551.720
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	453.850.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	325.000.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	195.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	130.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	128.850.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	8.850.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	120.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.852.257.780
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	534.757.840
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	473.421.440
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	5.285.810
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.215.600
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	50.834.990
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	39.317.499.940
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	39.317.499.940
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	86.448.650
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	80.038.400
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	80.038.400
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	6.410.250
5.2.02.08.09.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	6.410.250
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.841.562.099
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.262.908.017
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	326.021.376
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	936.886.641
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.578.654.082

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	251.282.957
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	42.775.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.284.596.125
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	35.038.920
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	35.038.920
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	35.038.920
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.254.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.254.000
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	1.254.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.183.780.446
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.183.780.446
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.183.780.446
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.663.137.480
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	259.500.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	800.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	13.461.142.966
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.553.033.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.636.930.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	113.636.930.500
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	109.336.930.500
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.300.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	15.000.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	15.000.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	50.866.366.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	42.802.255.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	42.402.255.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	400.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.064.111.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.650.000.000
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	6.414.111.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.659.737.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.659.737.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.659.737.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	390.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	390.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	390.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	617.159.480
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	536.759.480
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	401.183.480
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	378.621.880
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	22.561.600
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	135.576.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	135.576.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.400.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.400.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	80.400.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.864.731.217
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.864.731.217

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.864.731.217
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.864.731.217
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.864.731.217
5.4	BELANJA TRANSFER	271.865.618.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.781.322.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.781.322.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.781.322.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.781.322.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261.084.296.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	261.084.296.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	261.084.296.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	261.084.296.200
	Jumlah Belanja	1.677.977.263.966
	Total Surplus/(Defisit)	(3.134.325.472)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	40.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	40.000.000.000
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	40.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	36.865.674.528
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528
	Pembiayaan Netto	3.134.325.472
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Serdang Bedagai



Darma wijaya